

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 107

TAHUN 2020

## PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 25 ayat (2), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat perkembangan.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

(2) Sekretaris ..... 4

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. melaksanakan pembangunan Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Untuk ..... 5

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan ..... 6

- c. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- d. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan Pemerintah Desa;
- e. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Desa;
- f. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Desa;
- g. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- h. mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan kegiatan Desa;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- j. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan Desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Desa;
- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan mempunyai fungsi antara lain:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Kepala urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
  - c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
  - d. menyiapkan kegiatan rapat;
  - e. melaksanakan pengadministrasian aset dan inventarisasi aset dan bertindak sebagai operator aplikasi aset Desa
  - f. melaksanakan penyiapan perjalanan dinas;
  - g. melaksanakan pelayanan dan umum;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (5) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b Kepala urusan Keuangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - b. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  - c. melaksanakan tugas sebagai bendahara Desa;
  - d. melaksanakan tugas sebagai pemungut dan penyetor pajak dalam pelaksanaan APBDesa;
  - e. melaksanakan tugas sebagai operator aplikasi keuangan Desa;
  - f. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan APBDesa;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

- (6) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf c Kepala urusan Perencanaan mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun RPJMDesa, RKPDesa serta menyusun rencana APBDDesa;
  - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  - d. melaksanakan penyusunan laporan;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun perencanaan di bidang pemerintahan;
  - b. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - c. menyusun rancangan regulasi Desa;
  - d. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan dan administrasi pertanahan;
  - e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- f. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  - g. melaksanakan administrasi kependudukan;
  - h. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - i. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - j. melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
  - k. melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.
  - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemerintahan;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (5) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan di bidang kesejahteraan
  - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana/infrastruktur perdesaan dalam lingkup Kewenangan Desa,
  - c. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan umum dalam Lingkup kewenangan Desa;
  - d. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
  - e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, karang taruna dan perlindungan anak.
  - f. melaksanakan pembinaan kepada kelompok perempuan, pemuda, kelompok tani dan kelompok lain yang bergerak dibidang kesejahteraan;
  - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
  - h. melakukan pembinaan terhadap lembaga perekonomian Desa;
  - i. melaksanakan pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
  - j. melaksanakan pembinaan di bidang olah raga masyarakat;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - m. melaksanakan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang kesejahteraan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (6) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf c Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan bidang pelayanan;
  - b. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - c. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
  - d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
  - e. melakukan pembinaan terhadap organisasi keagamaan meliputi DKM, remaja masjid, MUI dan lembaga keagamaan lainnya;
  - f. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama;
  - g. melaksanakan koordinasi dalam pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera;
  - h. melaksanakan pembinaan dalam pengembangan BAZIS;
  - i. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap angkatan kerja;
  - j. memberikan pelayanan terhadap angkatan kerja;
  - k. melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah, Desa dan Keagamaan;
  - l. melaksanakan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pelayanan;
  - m. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dalam bidang kewilayahan;
  - b. melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan konflik antar anggota masyarakat;
- e. melaksanakan pendataan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayahnya;
- f. mensosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat;
- g. mensosialisasikan program-program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- h. melaksanakan pengawasan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- k. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- l. meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

### BAB III PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (2) Klasifikasi Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Desa.

- b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
  - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - 2) Urusan Keuangan; dan
  - 3) Urusan Perencanaan.
- c. Seksi, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pemerintahan;
  - 2) Seksi Kesejahteraan; dan
  - 3) Seksi Pelayanan.
- d. Kepala Dusun.

### Pasal 13

- (1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat memiliki:
  - a. 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi;
  - b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi;
  - c. 2 (dua) Urusan dan 3 (tiga) Seksi; atau
  - d. 3 (tiga) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
    - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
    - 2) Urusan Keuangan; dan
    - 3) Urusan Perencanaan.
  - c. Seksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pemerintahan;
    - 2) Seksi Kesejahteraan; dan
    - 3) Seksi Pelayanan.
  - d. Kepala Dusun.
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
    - 1) Urusan Umum dan Perencanaan; dan
    - 2) Urusan Keuangan.
  - c. Seksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pemerintahan; dan
    - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  - d. Kepala Dusun.

- (4) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
    - 1) Urusan Umum dan Perencanaan; dan
    - 2) Urusan Keuangan.
  - c. Seksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pemerintahan; dan
    - 2) Seksi Kesejahteraan; dan
    - 3) Seksi Pelayanan.
  - d. Kepala Dusun.
- (5) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
    - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
    - 2) Urusan Keuangan; dan
    - 3) Urusan Perencanaan.
  - c. Seksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pemerintahan; dan
    - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
  - d. Kepala Dusun.

#### Pasal 14

- (1) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
    - 1) Urusan Umum dan Perencanaan; dan
    - 2) Urusan Keuangan.
  - c. Seksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pemerintahan; dan
    - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  - d. Kepala Dusun.

#### Pasal 15

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa bersifat hierarki.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarki.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua  
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Desa dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan para Kepala Urusan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas para Kepala Urusan.

BAB V  
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pembentukan stuktur organisasi Pemerintah Desa;
  - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
  - c. tata kerja; dan
  - d. bagan struktur organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan evaluasi dan perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa paling cepat setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi dan perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terkait dengan jumlah formasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi mendasarkan pada klasifikasi desa.
- (3) Tata cara perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 19.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Desa yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 31 Desember 2020.

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 18 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 1985 03 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

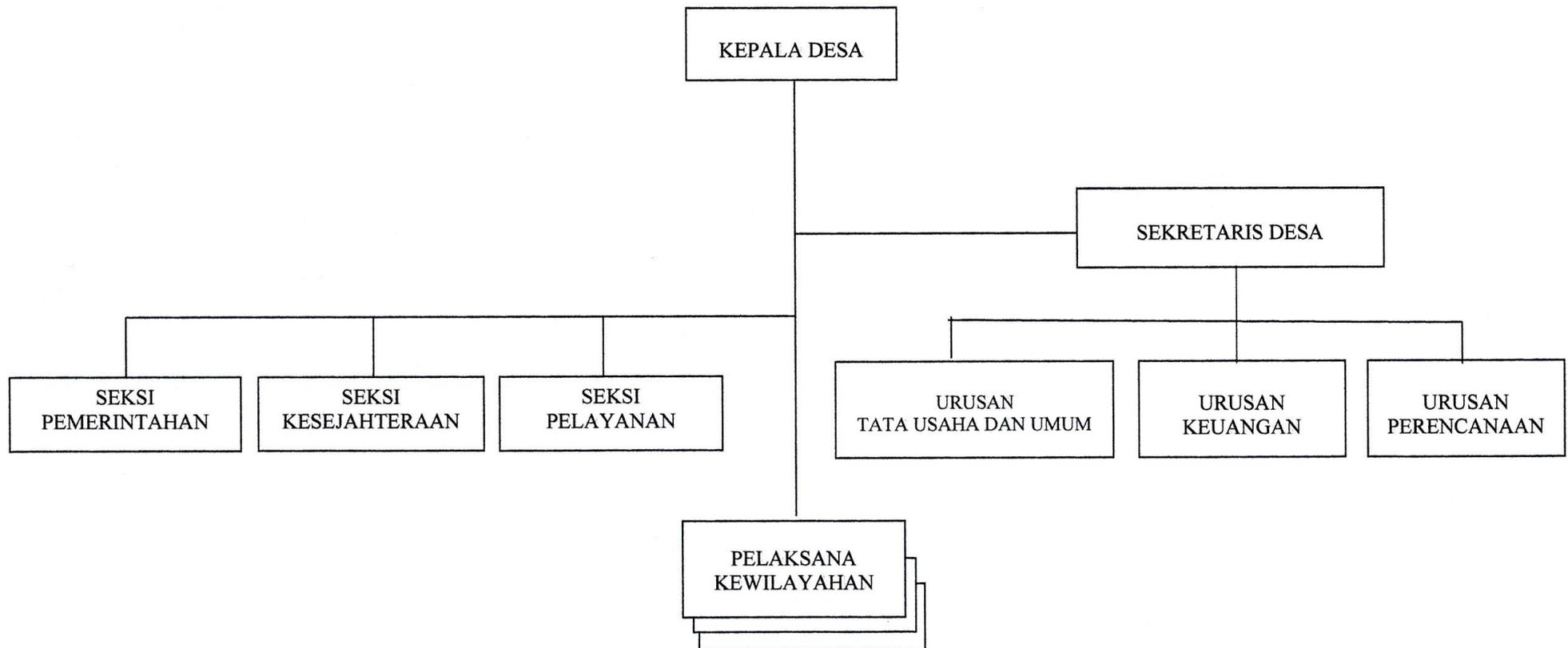
Nomor : 104 Tahun 2020

Tanggal : 18 November 2020

Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

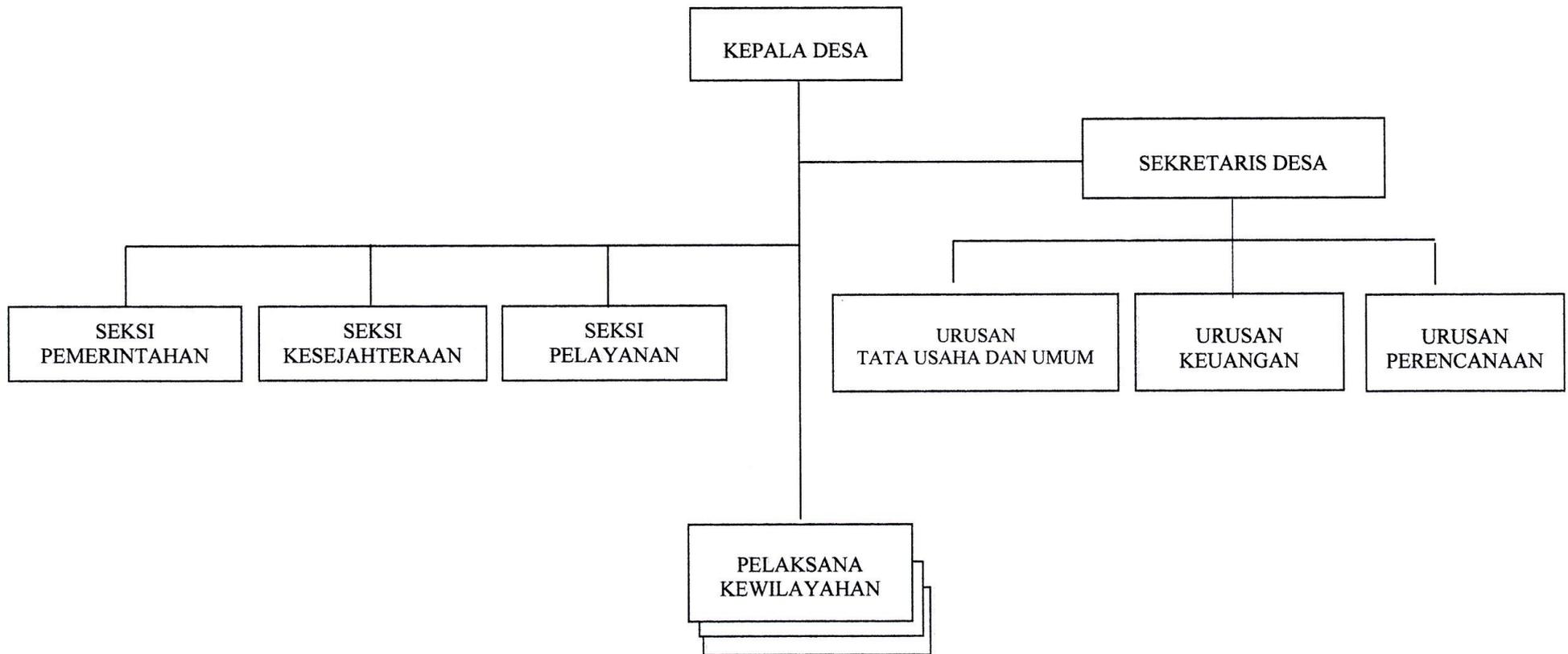
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWASEMBADA

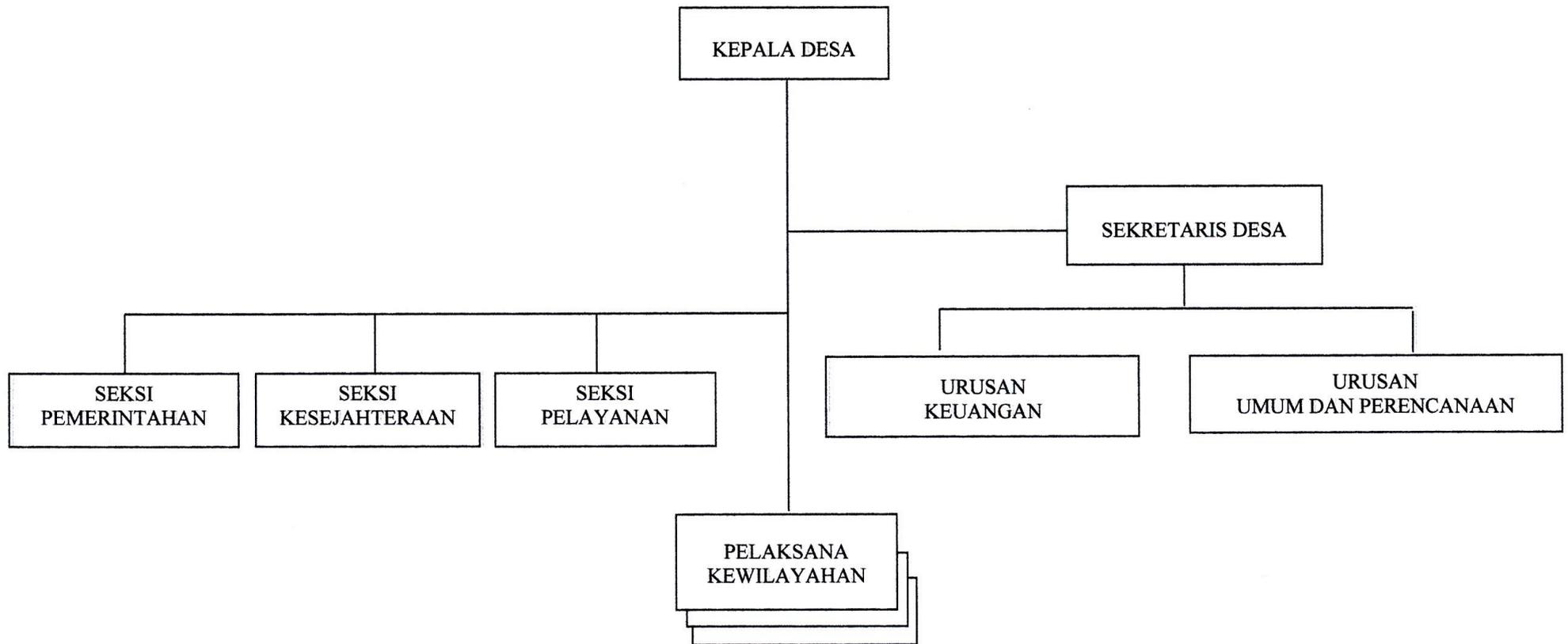


B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA

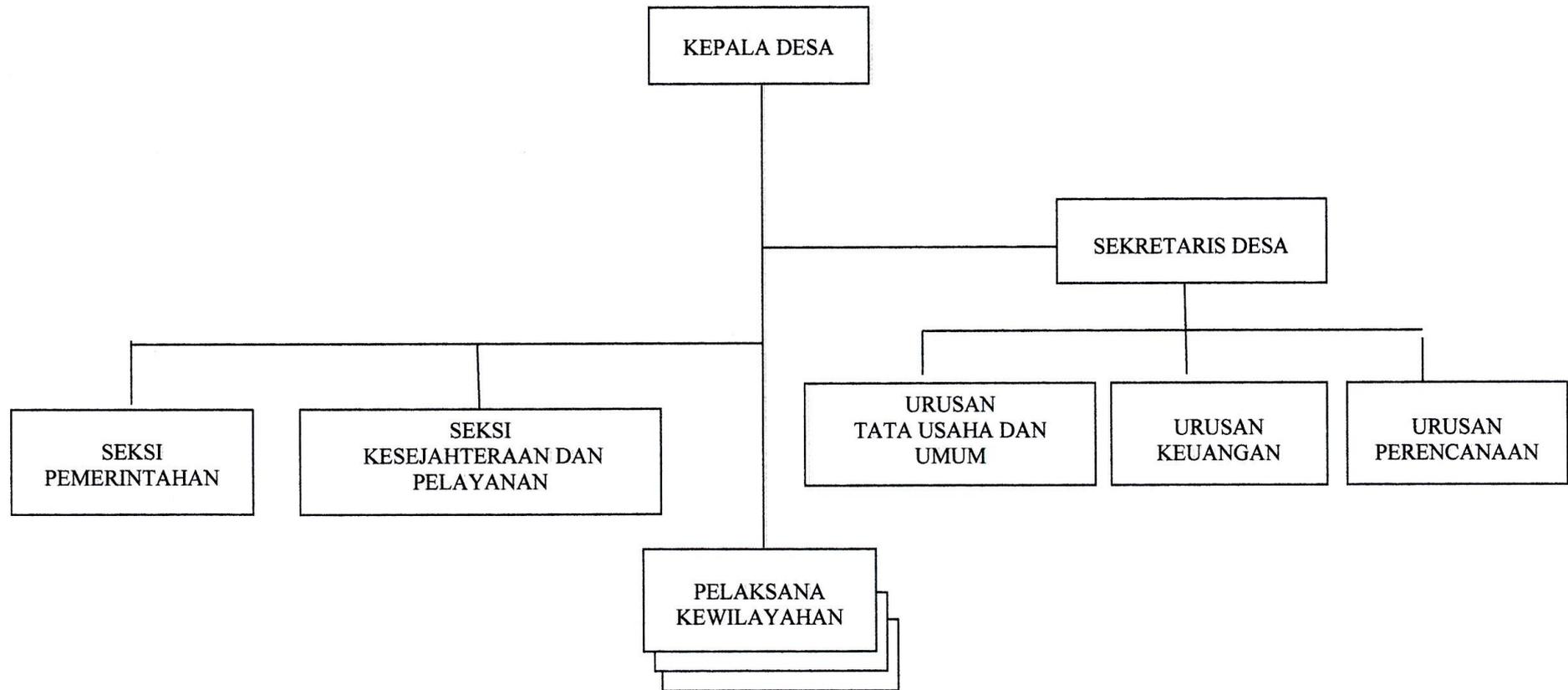
1. DESA SWAKARYA (3 (TIGA) SEKSI DAN 3 (TIGA) URUSAN)



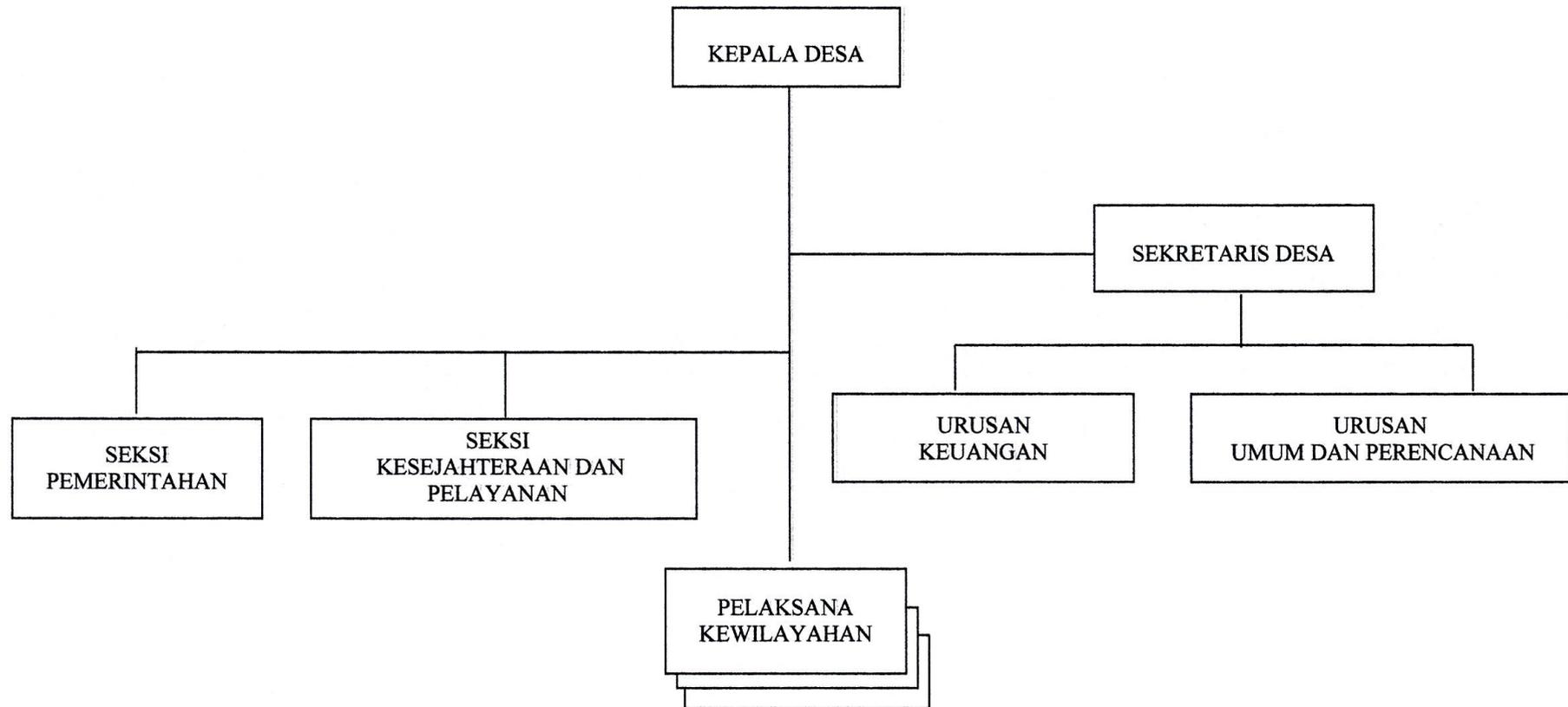
2. DESA SWAKARYA (3 (TIGA) SEKSI DAN 2 (DUA) URUSAN



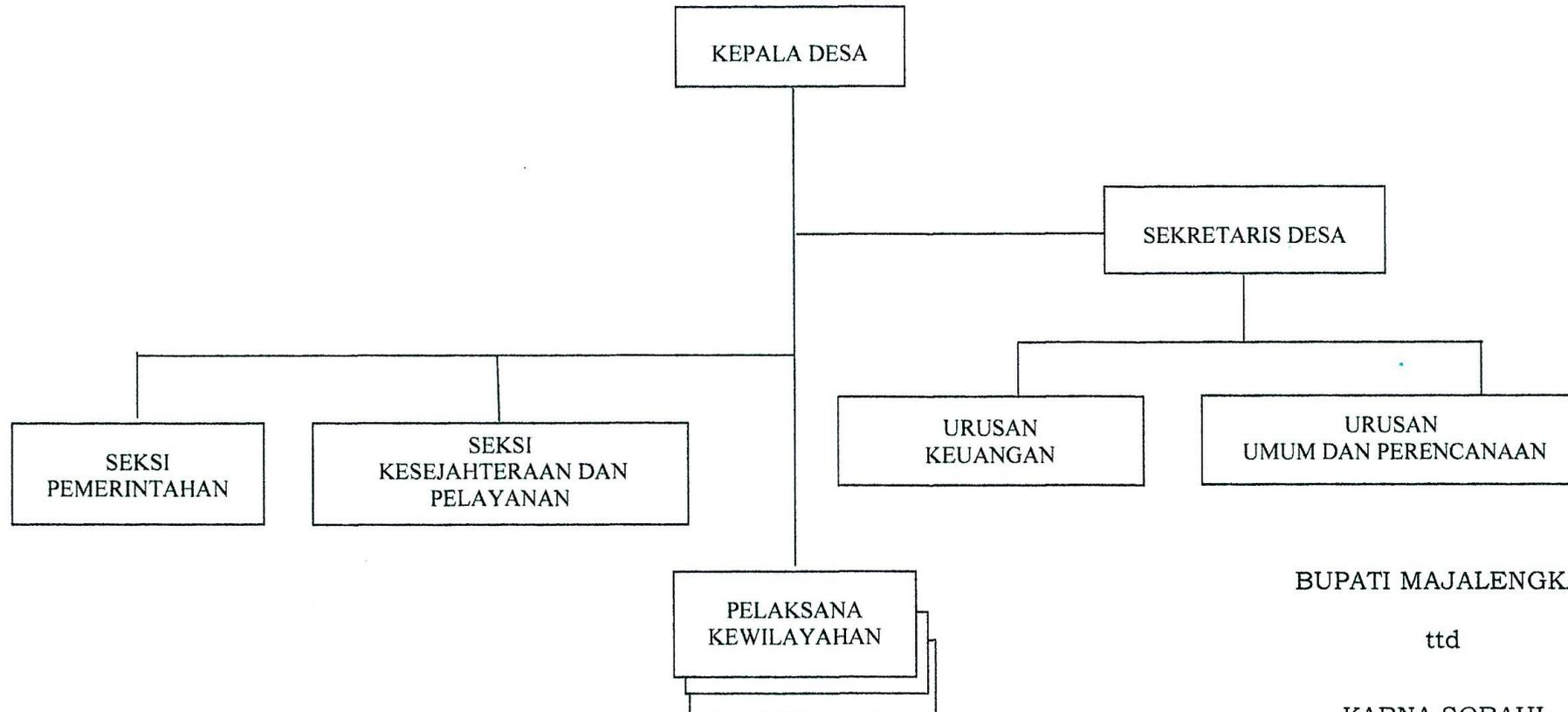
3. DESA SWAKARYA (2 (DUA) SEKSI DAN 3 (TIGA) URUSAN



4. DESA SWAKARYA (2 (DUA) SEKSI DAN 2 (DUA) URUSAN



C. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWADAYA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

BSEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP.19651225 198503 1 003